

TESIS

PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KEDIRI



Disusun Oleh :

NURUL PUSPA IRAWATI

NIM : 225112060

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU KESEHATAN
MASYARAKAT UNIVERSITAS STRADA INDONESIA**

KOTA KEDIRI

2024

TESIS

PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KEDIRI

Untuk memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Kesehatan (M.Kes)
Dalam Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat
Universitas Strada Indonesia



Disusun Oleh :

NURUL PUSPA IRAWATI

NIM : 225112060

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU KESEHATAN
MASYARAKAT UNIVERSITAS STRADA INDONESIA
KOTA KEDIRI**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN
PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KEDIRI

Diajukan Oleh :

NURUL PUSPA IRAWATI

NIM. 225112060

TESIS INI TELAH DISETUJUI

Pada tanggal, September 2024
Dosen Pembimbing (1)



Dr. Indasah, Ir., Mkes
NIDN : 0730086801

Pada Tanggal, September 2024
Dosen Pembimbing (2)



Dr. Haryono, SKM., M.Sc
NIDK : 8842880018

MENGETAHUI
Universitas STRADA INDONESIA Kediri
Direktur Pascasarjana



Dr. Indasah, Ir., M.Kes
NIDN: 0730086801

LEMBAR PENGESAHAN
PENGELOLAAN SAMPAH DIKABUPATEN KEDIRI

Oleh :

Nurul Puspa Irawati

NIM. 225112060

Tesis Ini Telah Diuji Dan Dinilai Oleh Panitia Penguji
Pada Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat
pada tanggal, 18 Oktober 2024

Tim Penguji :

Ketua Penguji

: Dr. dr. Sentot Imam Suprpto ,MM

Anggota Penguji

: 1. Dr. Siti Farida, M.Pd

2. Dr. Indasah, Ir., M.Kes

3. Dr. Haryono, SKM., M.Sc

.....
.....
.....
.....

MENGETAHUI

Universitas STRADA Indonesia

Direktur Pascasarjana



Dr. Indasah, Ir., M.Kes

NIDN: 0730086801

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah TESIS ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka. Apabila ternyata didalam naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh MAGISTER KESEHATAN/M.Kes dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kediri, ...

Mahasiswa,



Nama : **NURUL PUSPA IRAWATI**
NIM : 225112060
PS : Program Studi Magister kesehatan
Peminatan : Kesehatan Lingkungan
Institusi : Universitas STRADA Indonesia Kediri

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya tesis dengan judul “PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KEDIRI”, sebagai salah satu persyaratan akademis dalam rangka menyelesaikan kuliah program pascasarjana kesehatan masyarakat Universitas STRADA Indonesia Kediri.

Penulis menyampaikan terimakasih kepada suami dan anak-anak saya tercinta yang telah memberikan dukungan baik moril dan materiil selama ini sehingga saya mampu menyelesaikan tesis ini.

Selanjutnya terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing tesis ini Dr. Indasah, Ir, M.Kes dan Dr. Haryono,SKM.,M.Sc yang telah memberikan bimbingan, koreksi, serta saran hingga terwujudnya tesis ini. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada:

1. Dr. dr. Sentor Imam Suprpto, MM selaku Rektor Universitas STRADA Indonesia Kediri
2. Dr. Indasah, Ir.,M.Kes, selaku Direktur Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas STRADA Indonesia yang Sudah memberikan fasilitas untuk melakukan penelitian ini dan juga selaku pembimbing I yang telah memberikan masukan dan saran demi kesempurnaan tesis ini
3. Dr. Haryono, SKM.,M.Sc, selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran demi kesempurnaan tesis ini
4. Suami dan anak-anak tercinta yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam penyusunan tesis ini agar bisa selesai dengan baik
5. Seluruh dosen dan staf Universitas STRADA Indonesia Kediri
6. Kepala dan seluruh staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri
7. Kepala dan staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kediri
8. Kepala dan staf Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri
9. Ketua TPS3R, Bank Sampah se Kabupaten Kediri
10. Seluruh Informan yang telah membantu

11. Teman-teman mahasiswa Universitas STRADA Indonesia Kediri
12. Semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan pahala atas segala amal yang telah diberikan dan semoga tesis ini dapat menjadi landasan yang tepat bagi penulis dan pihak lain yang membutuhkan.

Dalam penulisan tesis ini penulis telah berikhtiar semaksimal mungkin agar dapat memenuhi ekspektasi dari berbagai pihak, namun penulis menyadari bahwa sesungguhnya kesempurnaan hanya milik-Nya sehingga mungkin masih banyak kekurangan dalam penulisan penelitian ini, oleh sebab itu penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini.

Kediri, Januari 2024

ABSTRAK

PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KEDIRI

**Oleh :
Nurul Puspa Irawati**

Pengelolaan sampah di Kabupaten Kediri menjadi masalah yang belum bisa diatasi sepenuhnya oleh Pemerintah daerah. Dan Pemda sampai saat ini berusaha untuk meningkatkan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi. Penelitian Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kediri ini bertujuan untuk mengeksplorasi teknis operasional pengelolaan sampah, kebijakan dan regulasi pengelolaan sampah, pembiayaan pengelolaan sampah, kelembagaan pengelolaan sampah, partisipasi masyarakat, dan kendala dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kediri. Penelitian ini adalah diskriptif kualitatif, yakni penelitian yang bermaksud mendeskripsikan suatu fenomena. Pengumpulan datanya menggunakan Teknik wawancara, kuisioner, observasi dan dokumentasi. Uji keabsahannya datanya memakai metode triangulasi. Datanya dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Dari hasil peneltian ini dapat ditarik Kesimpulan. Pertama, aspek teknis operasional, persen penanganan sampah eksisting pada Kabupaten Kediri sebesar 12%, sedangkan persen pengurangan sebesar 2,1%, sehingga persen pelayanan persampahan Kabupaten Kediri sebesar 14,1%. Kedua, aspek Kebijakan dan Regulasi, dinilai masih rendah yaitu belum adanya kebijakan dan regulasi yang mengikat mengenai penetapan retribusi persampahan di Masyarakat. Ketiga, Aspek Pembiayaan, masih rendahnya komitmen anggaran dari Pemerintah daerah dan dilembaga-lembaga pengelolaan sampah di TPS3R. Keempat, aspek kelembagaan, kelembagaan Masyarakat eksisting yang berjalan hanya berpusat pada TPS3R. Kelima, aspek partisipasi Masyarakat yaitu banyak Masyarakat yang merasa tidak membutuhkan penanganan sampah secara kolektif. Berdasarkan hasil peneltian, direkomendasikan lima hal, pertama, Mengoptimalisasi pada 23 TPS3R eksisting dan penambahan TPST untuk Lokasi jauh dari TPA. Kedua, penetapan komitmen anggaran sebesar=% terutama pada Pembangunan TPST dan penutupan TPA Sekoto. Ketiga, peningkatan kerja kewirausahaan TPS3R. Keempat, adanya kebijakan pada level perbup atau perda untuk kelembagaan. Kelima, Sosialisasi 3R (Reuse, reduce, recycle).

Kata kunci : Problematika sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Kediri, usulan perbaikan

ABSTRACT

WASTE MANAGEMENT IN KEDIRI REGENCY

By :

Nurul Puspa Irawati

Waste management in Kediri Regency is a problem that the regional government has not been able to fully overcome. And the Regional Government is currently trying to improve its integrated waste management system. This Waste Management Research in Kediri Regency aims to explore technical operational waste management, waste management policies and regulations, waste management financing, waste management institutions, community participation, and obstacles in waste management in Kediri Regency. This research is descriptive qualitative, namely research that aims to describe a phenomenon. Data collection uses interview techniques, questionnaires, observation and documentation. Test the validity of the data using the triangulation method. The data was analyzed descriptively-qualitatively. From the results of this research, conclusions can be drawn. First, the operational technical aspect, the percentage of handling of existing waste in Kediri Regency is 12%, while the percentage of reduction is 2.1%, so that the percentage of waste service in Kediri Regency is 14.1%. Second, the Policy and Regulation aspect is considered to be still low, namely the absence of binding policies and regulations regarding the determination of waste levies in the community. Third, the financing aspect, there is still low budget commitment from the regional government and waste management institutions in TPS3R. Fourth, the institutional aspect, the existing community institutions that are running are only centered on TPS3R. Fifth, the aspect of community participation, namely that many people feel that they do not need collective waste management. Based on the research results, five things are recommended, first, optimizing the 23 existing TPS3Rs and adding TPSTs for locations far from the landfill. Second, determining a budget commitment of =%, especially for the construction of the TPST and the closure of the Sekoto TPA. Third, increasing TPS3R entrepreneurial work. Fourth, there are policies at the perbup or regional regulation level for institutions. Fifth, Socialization of 3R (Reuse, reduce, recycle). Keywords: Waste Management in Kediri Regency, Problems with the waste management system in Kediri Regency, suggestions for improvement.

Keywords: Problems with the waste management system in Kediri Regency, suggestions for improvement

RINGKASAN

PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KEDIRI

A. Latar Belakang

Pengelolaan sampah di Kabupaten Kediri dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2018 meliputi Upaya pengurangan dan penanganan sampah, pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan Kembali dan pendaurulangan sedangkan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Kabupaten Kediri merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.523,92 km². Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2021 jumlah penduduk Kabupaten Kediri sebanyak 1.673.158 jiwa dengan kepadatan penduduk adalah 1.217,28 jiwa/Km², dengan pertumbuhan rata-rata 0,74%. Kondisi tersebut memberikan pengaruh bahwa peningkatan jumlah penduduk harus diimbangi dengan tingkat pelayanan umum yang memadai, khususnya terhadap berbagai sektor yang berhubungan dengan pemenuhan terhadap aktivitas masyarakat, salah satunya adalah sektor persampahan. Berdasarkan data SIPSN tahun 2021, timbulan sampah Kabupaten Kediri sebesar 195.845 ton/tahun naik 9.177ton dibanding tahun 2020.

Berdasarkan Perpres No. 97 Tahun 2017 tentang Jakstranas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengelolaan sampah terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. Proses pengurangan sampah dilakukan oleh masyarakat, sedangkan penanganan sampah dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah Kabupaten Kediri menargetkan pengelolaan sampah pada tahun 2025 mencapai 100%, sampah terkelola yang terbagi menjadi pengurangan sampah (30%) dan penanganan sampah (70%) Kondisi eksisting pengelolaan persampahan di Kabupaten Kediri masih jauh dari target. Data tahun 2022 menunjukkan indikator penanganan sampah masih mencapai angka 15,3% dari target 70% sedangkan pengurangan sampah masih mencapai angka 5,1% dari target 30%.

Berbagai upaya pengelolaan sampah di Kabupaten Kediri telah diatur pada

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan. Bupati Kediri Nomor 64 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Seperti pada umumnya, pengelolaan sampah di Kabupaten Kediri sebagian besar menggunakan sistem ‘kumpul-angkut-buang’. Adapun upaya 3R (reduce, reuse, recycle) perlu ditingkatkan lagi agar lebih sistematis. Disamping itu, terdapat isu penting yang dihadapi oleh Kabupaten Kediri yaitu terbatasnya kapasitas Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Sekoto yang sesuai dengan Masterplan TPAS Sekoto akan penuh dalam 2 tahun 83 hari. Oleh karena itu diperlukan pengembangan untuk penambahan kapasitas TPAS Sekoto. Rencana lain yang sedang dalam progres adalah pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang terletak di TPA Sekoto yang bertujuan untuk meminimalkan jumlah sampah yang dibuang di landfill TPAS Sekoto.

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi system pengelolaan persampahan yang terintegrasi mulai dari hulu sampai hilir baik dari pola pengelolaan persampahannya/ tehnik operasionalnya, sistem kelembagaan, Kebijakan/regulasi dan peran serta masyarakatnya yang komprehensif dalam jangka waktu panjang secara keseluruhan terkait dengan perkembangan wilayah maupun program pembangunan TPAS Regional Kabupaten Kediri. diperlukan suatu Analisa untuk mengetahui tingkat pengelolaan sampah dan factor-faktor yang mempengaruhi. Dengan harapan setelah mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi, dapat dicarikan solusi agar penerapan pengelolaan sampah dapat berkualitas dan lebih baik.

B. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan merupakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode kualitatif deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek/obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak. Menurut Sugiyono (2022) mendefinisikan metode kualitatif deskriptif adalah memberikan gambaran secara medetail tentang latar belakang, sifat dan karakter

dari kasus yang diteliti.

Metode kualitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk meneliti obyek kajiannya dan mengadakan interaksi langsung dengan Masyarakat, pengelola TPS3R, pengelola bank sampah dan pengelola sampah di Dinas Lingkungan Hidup yang bertujuan mendapatkan informasi yang mendalam mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan pendekatan utama yang digunakan merupakan pendekatan yang bersifat evaluatif dan komprehensif.

C. Hasil Penelitian

1. Aspek Tekhnis Operasional

Penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga terdiri atas dua tahap yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Di Kabupaten Kediri sumber timbulan sampah dikelompokkan berdasarkan pembagian Kawasan prioritas yaitu Kawasan agropolitan, kawasan strategi ekonomi cepat tumbuh, Kawasan tumbuh cepat dan Kawasan strategi transportasi dan prioritas pengembangan. Setiap Kawasan memiliki tiga kategori sumber timbulan sampah yaitu sampah kawasan permukiman pedesaan dan sumber sampah Kawasan permukiman perkotaan. Dihitung dari keseluruhan Kawasan Kabupaten Kediri, nilai timbulan sampah adalah 0,47 kg/OH. Sedangkan Kawasan sampah rumah tangga berdasarkan Kawasan adalah sebagai berikut Kawasan agropolitan dan ekonomi cepat tumbuh komposisi sampah didominasi oleh sampah organik, sampah kebun dan sampah plastic. Pada Kawasan tumbuh cepat jenis sampah terbanyak adalah sampah organik, sampah popok dan sampah kertas. Pada Kawasan Strategis transportasi dan prioritas pengembangan sampah rumah tangga didominasi oleh sampah plastic, sampah organik dan sampah konstruksi/sisa bangunan. Menurut SNI 19-2452-2002 definisi timbulan sampah adalah banyaknya sampah yang timbul dari Masyarakat dalam satuan volume maupun perkapita per hari atau perluas bangunan atau perpanjang jalan. Dan sesuai dengan SNI 3242-2008 memperkirakan volume timbulan sampah untuk Kota Besar 3 liter/or/hari dan kota kecil 2,5

liter/or/hari sedangkan berat jenis sampah digunakan asumsi 200 – 300 kg/m³ (0,2 – 0,3 kg/liter) sehingga sampah yang dihasilkan setiap orang perharinya adalah 0,5 Kg.

Pada Kondisi eksisting sesuai dengan data SIPSN 2022, Kabupaten Kediri memiliki bank sampah sejumlah 42 unit. Kegiatan pengelolaan sampah di Bank sampah mampu mengurangi potensi sampah dtimbun ke TPA sebanyak 208.500 kg/tahun atau 571,2 kg/hari. Dan kalau ada yang melakukan kegiatan composting di setiap rumah tangga Tingkat RT/RW maka hal ini dapat mengurangi sampah sebanyak 1.800 kg/hari. Sehingga jika dibandingkan dengan potensi sampah Kabupaten (pengurangan sampah di sumber adalah sebanyak 0,4%).

Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Kediri, dengan menggunakan radius jangkauan 2 km untuk TPS3R yang memiliki luasan 100-200 m² dan 3 km untuk luasan TPS3R diatas 200 m², terdapat 176 (48 %) desa yang terlayani oleh fasilitas persampahan TPS3R, ini menunjukkan komitmen dalam memastikan bahwa Sebagian besar wilayah memiliki akses ke fasilitas pengelolaan sampah yang berkelanjutan, sedangkan 168 (52%) desa lainnya tidak terlayani, hal ini menunjukkan bahwa ada ruang untuk perbaikan dalam Upaya pengelolaan sampah terutama di desa-desa yang belum tercakup.

Menurut peneliti pengelolaan sampah yang baik adalah sangat penting dilakukan terutama dengan pengelolaan sampah berbasis 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) dimulai dari sumbernya, dimana hal ini dapat meminimalisir terjadinya dampak lingkungan. Timbulnya berbagai macam penyakit dan kerusakan lingkungan hidup adalah akibat timbunan sampah oleh aktivitas manusia tidak dikelola dengan baik. Selain itu bila mengkontaminasi makhluk hidup juga sangat berbahaya. Pengelolaan sampah secara tehnik operasinal di Kabupaten Kediri masih cukup kurang dimana Tingkat penanganan Kawasan saat ini masih 12% bisa dilihat dari jumlah TPS3R dan jumlah TPS serta pengangkutan ke TPA yang masih terbatas. Sedangkan Tingkat pengurangan dari bank sampah juga masih kecil yaitu 0,4% dengan masih kecilnya jumlah bank sampah di Kabupaten Kediri. Sistem angkutan yang belum efisien 70% yaitu dengan jarak lebih dari 25 Km per ritasi dan daerah yang terlayani oleh system angkutan 54% atau baru 185 desa dan 1 kelurahan, sedangkan pengolahan di TPS3R yaitu reduksi TPS3R 2% dengan

konsentrasi sampah plastik dan kertas, banyak pengomposan yang tidak berjalan. Sedangkan kondisi TPA sebagai pemrosesan akhir sampah ini hanya mencukupi hingga 1 tahun sejak tahun 2023, belum dilakukan penutupan lahan TPA yang pasif, belum melayani keseluruhan Kabupaten, pemadatan sampah di landfill kurang maksimal, tapi sudah ada perencanaan TPST di lokasi TPA Sekoto, dan ada kemungkinan akan ada rencana Pembangunan TPA regional di wilayah Kecamatan Mojo.

2. Aspek kelembagaan

Pengelolaan sampah di Kabupaten Kediri berada di bawah tanggung jawab Bidang pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 34 Tahun 2022. Kondisi saat ini lembaga yang menangani pengelolaan sampah mengacu pada Peraturan Bupati Kediri Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri khususnya pada Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Limbah.

Sedangkan kelembagaan persampahan berbasis Masyarakat ada 3 jenis yaitu kelembagaan di sumber persampahan (Pemberdayaan Masyarakat Reduksi Persampahan), kelembagaan di Pengolahan Persampahan (TPS3R) dan kelembagaan di pemrosesan akhir persampahan (TPA).

Gambaran keterlibatan organisasi kemasyarakatan di setiap kawasan strategis dan kawasan perdesaan. Secara umum tiga (3) Kawasan Strategis (Agropolitan, Transportasi, Tumbuh Cepat Perkotaan) dan Kawasan Perdesaan memiliki angka persentase “Belum Terlibat Aktif” yang cukup besar (di atas 45%). Sedangkan Kawasan Cepat Tumbuh (Ngasem-Pare) organisasi kemasyarakatannya sudah terlibat aktif 100%. Kawasan Cepat Tumbuh hanya terdiri dari dua (2) desa (Ngasem dan Pare), sehingga pada kedua tersebut organisasi kemasyarakatannya dapat dipastikan telah terlibat aktif. Kawasan Agropolitan memiliki persentase organisasi kemasyarakatan “Sangat Terlibat Aktif” paling besar dengan persentase 10%. Sedangkan Kawasan Perdesaan memiliki persentase 18% (paling besar dari lima kawasan) untuk organisasi kemasyarakatan yang “Tidak Terlibat” dalam persampahan di desa-desanya. Kawasan Tumbuh Cepat (Perkotaan) memiliki

persentase 44% untuk organisasi kemasyarakatan yang “Terlibat Aktif” dalam berpartisipasi di persampahan, hal ini cukup logis karena melihat masyarakat perkotaan notabene sudah memiliki model kelembagaan masyarakatnya masing-masing dan aktif dalam pengumpulan sampah kolektifnya.

Adapun beberapa isu utama hasil penelitian kondisi eksisting dan permasalahan yang ada pada sub sistem kelembagaan meliputi kelembagaan Masyarakat yang berjalan hanya berpusat pada TPS3R, beberapa desa memiliki sumber daya manusia yang lebih baik untuk memiliki struktur bertingkat diantara TPS3R yang ada, masih membutuhkan system komunikasi antara TPS3R dan dengan adanya rencana Pembangunan TPST masih belum terdapat sistem kelembagaan yang menunjang.

3. Aspek Kebijakan/Regulasi

Pada aspek kebijakan / regulasi, Kabupaten Kediri sudah memiliki kebijakan- kebijakan yang bersifat konvensional dan normative maupun yang bersifat inovatif. Berdasarkan hasil nalisa dapat disimpulkan bahwa aspek kebijakan atau regulasi yang menaungi permasalahan persampahan saat ini masih relative cukup rendah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut :

- **Kebijakan Normatif dan Konvensional:** Kabupaten Kediri sudah memiliki regulasi tertentu yang mengatur tata kelola dan penanganan sampah, seperti Peraturan Bupati Peraturan Bupati nomor 55 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kediri, Perda nomor 2 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, serta retribusi pelayanan persampahan pada Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan.
- **Kebijakan Inovatif:** Implementasi TPS3R merupakan langkah inovatif dalam penanganan sampah, tetapi belum didukung oleh landasan hukum yang jelas. Dokumen perencanaan dan petunjuk teknis sudah ada, namun belum diatur secara hukum atau regulasi.
- **Pengaturan Reduksi Sampah di Sumber:** Kebijakan tentang reduksi sampah di sumber sudah diatur, tetapi tidak mencantumkan target atau capaian yang diinginkan.

- **Target Penanganan Sampah:** Dalam SSK (Strategi Pengelolaan Sampah Kabupaten), terdapat target yang ingin dicapai terkait penanganan dan pengurangan sampah, namun belum ada strategi insentif/disinsentif atau penjabaran lebih lanjut terkait kebijakan tersebut.
- **Rencana TPST:** Pengembangan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) direncanakan, tetapi belum memiliki landasan hukum atau lembaga yang jelas terkait dengan TPST tersebut.
- **Penetapan Retribusi:** Sudah terdapat retribusi mengenai pengelolaan persampahan pada Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan, namun belum ada kebijakan yang mengikat mengenai penetapan dan pelaksanaan retribusi persampahan.

4. Aspek Partisipasi Masyarakat

Masyarakat memiliki peran yang penting dalam partisipasinya dalam pengelolaan dan pengolahan sampah, terutama dalam pengumpulan sampah. Dengan adanya sistem pengangkutan sampah atau kelembagaan persampahan di desa, maka peran masyarakat sudah jelas yaitu mewadahi sampahnya masing-masing untuk kemudian dikumpulkan secara kolektif oleh anggota lembaga persampahan di desa., dimana Kawasan Tumbuh Cepat (Perkotaan) memiliki jumlah persentase paling tinggi (56%) untuk keterlibatan masyarakatnya dalam pewadahan di rumah (untuk kemudian diangkut ke TPS). Sehingga mengindikasikan bahwa desa-desa pada Kawasan Tumbuh Cepat (Perkotaan) memang sudah mengaplikasikan pengumpulan sampah kolektif, dan berjalan karena masyarakatnya telah aktif dalam mewadahi sampah mereka masing-masing untuk pengumpulan kolektif.

Sedangkan Kawasan Agropolitan memiliki persentase paling tinggi (80%) dalam tidak adanya pewadahan di rumah oleh masyarakat di rumah masing-masing, mengindikasikan bahwa belum terdapat sistem pengumpulan sampah kolektif dan masyarakat kawasan agropolitan cenderung masih melakukan pengelolaan sampah mandiri. Begitu pula pada Kawasan Perdesaan dengan persentase 75% untuk tidak adanya pewadahan di rumah oleh masyarakat di rumah

masing-masing yang kemudian dapat disimpulkan bahwa desa-desa dalam Kawasan Perdesaan masih melakukan pengelolaan sampah mandiri.

Sistem retribusi merupakan sebuah sistem pembayaran yang harus hadir di sebuah desa yang menginginkan adanya pengumpulan sampah secara kolektif. Sehingga pengumpulan sampah kolektif tersebut bisa terus berjalan dan dapat mendanai pengelolaannya juga. Sehingga penting untuk mengetahui level *willingness to pay* (kemampuan membayar) masyarakat. Dapat diamati bahwa range *willingness to pay* 5.000-10.000 memiliki persentase paling banyak di Kawasan Agropolitan dan Kawasan Transportasi. Sedangkan Kawasan Tumbuh Cepat (Perkotaan) menunjukkan persentase paling banyak (34%) untuk *willingness to pay*-nya adalah <5.000. Namun Kawasan Tumbuh Cepat (Perkotaan) juga merupakan satu-satunya kawasan yang memiliki persentase di atas 30% untuk *willingness to pay* masyarakat sebesar 20.000-

30.000. Menunjukkan bahwa keragaman bangunan di Kawasan Tumbuh Cepat (Perkotaan) memang berbeda dari kawasan lainnya (ragamnya lebih banyak dan luasannya lebih besar, sehingga perlu membayar sistem retribusi lebih tinggi). Sedangkan untuk Kawasan Perdesaan, 35% menyanggupi untuk membayar <5.000 dan 18% mengatakan belum tahu untuk kemampuan membayar masyarakatnya. Hal ini dapat diatasi dengan menetapkan kompensasi retribusi tertentu pada desa-desa yang belum terlayani dan belum diketahui kemampuan membayar.

SUMMARY

WASTE MANAGEMENT IN KEDIRI DISTRICT

A. Background

Waste management in Kediri Regency with reference to Law Number 18 of 2018 includes efforts to reduce and handle waste, waste reduction includes limiting, reuse and recycling activities while waste handling includes sorting, collecting, transporting, processing and final processing of waste.

Kediri Regency is one of the regencies in East Java Province with an area of 1,523.92 km². Based on data from the Central Statistics Agency (BPS), in 2021 the population of Kediri Regency will be 1,673,158 people with a population density of 1,217.28 people/Km², with an average growth of 0.74%. This condition has the effect that the increase in population must be balanced with an adequate level of public services, especially in various sectors related to fulfilling community activities, one of which is the waste sector. Based on SIPSN data for 2021, waste generation in Kediri Regency was 195,845 tonnes/year, an increase of 9,177 tonnes compared to 2020.

Based on Presidential Decree no. 97 of 2017 concerning Jakstranas Management of Household Waste and Similar Types of Household Waste, waste management consists of reducing waste and handling waste. The waste reduction process is carried out by the community, while waste handling is carried out by the government. The Kediri Regency Government is targeting waste management by 2025 to reach 100%, managed waste which is divided into waste reduction (30%) and waste handling (70%). The existing condition of waste management in Kediri Regency is still far from the target. Data for 2022 shows that waste handling indicators still reach 15.3% of the 70% target, while waste reduction still reaches 5.1% of the 30% target.

Various waste management efforts in Kediri Regency have been regulated in Kediri Regency Regional Regulation Number 2 of 2016 concerning Waste Management and Regulations. Regent of Kediri Number 64 of 2018 concerning Regional Policies and Strategies for Management of Household Waste and Similar Types of Household Waste.

As in general, waste management in Kediri Regency mostly uses a 'collect-transport-dispose' system. The 3R (reduce, reuse, recycle) efforts need to be increased to be more systematic. Apart from that, there is an important issue faced by Kediri Regency, namely the limited capacity of the Sekoto Final Processing Site (TPA), which in accordance with the Sekoto TPAS Masterplan will be full in 2 years 83 days. Therefore, development is needed to increase the capacity of the Sekoto TPAS. Another plan that is currently in progress is the construction of an Integrated Waste Processing Site (TPST) located at the Sekoto TPA which aims to minimize the amount of waste disposed of at the Sekoto TPA landfill. To increase the effectiveness and efficiency of an integrated waste management system from upstream to downstream both in terms of waste management patterns/operational techniques, institutional systems, policies/regulations and comprehensive community participation in the long term as a whole related to regional development and the TPAS development program Kediri Regency Regional. An analysis is needed to determine the level of waste management and the influencing factors. With the hope that after knowing the influencing factors, solutions can be found so that the implementation of waste management can be of better quality.

B. Research Methods

The research approach used is a qualitative approach with descriptive research type. The descriptive qualitative method is a problem solving procedure that is investigated by describing the current state of the research subject/object based on visible facts. According to Sugiyono (2022), the descriptive qualitative method is defined as providing a detailed description of the background, nature and character of the case studied.

The descriptive qualitative method used in this research, researchers will go directly into the field to research the object of their study and hold direct interactions with the community, TPS3R managers, waste bank managers and waste managers at the Environmental Service with the aim of obtaining in- depth information regarding waste management in the Regency. Kediri. This research uses a qualitative approach, namely the main approach used is an evaluative and

comprehensive approach.

C. Research Result

1. Operasional Technical Aspects

The management of household waste and similar household waste consists of two stages, namely waste reduction and waste handling. In Kediri Regency, sources of waste generation are grouped based on the division of priority areas, namely agropolitan areas, fast growing economic strategy areas, fast growing areas and transportation strategy and development priority areas. Each area has three categories of waste generation sources, namely waste from rural residential areas and waste sources from urban residential areas. Calculated from the entire Kediri Regency area, the waste generation value is 0.47 kg/OH. Meanwhile, household waste areas based on area are as follows: Agropolitan and fast-growing economic areas, waste composition is dominated by organic waste, garden waste and plastic waste. In fast growing areas the most types of waste are organic waste, diaper waste and paper waste. In strategic areas, transportation and development priorities for household waste are dominated by plastic waste, organic waste and construction waste/building waste. According to SNI 19-2452-2002, the definition of waste generation is the amount of waste arising from the community in volume units or per capita per day or expanding buildings or extending roads. And in accordance with SNI 3242-2008, the estimated volume of waste generation for large cities is 3 liters/or/day and small cities is 2.5 liters/or/day, while the waste specific gravity is assumed to be 200-300 kg/m³ (0.2 – 0.3 kg/liter) so that the waste produced by each person per day is 0.5 kg. In existing conditions according to SIPSN 2022 data, Kediri Regency has 42 waste banks. Waste management activities at the Waste Bank are able to reduce the potential for waste to be landfilled in landfills by 208,500 kg/year or 571.2 kg/day. And if someone carries out composting activities in every household at the RT/RW level, this can reduce waste by 1,800 kg/day. So

when compared with the District's waste potential (reducing waste at the source is 0.4%).

The research results show that Kediri Regency, using a coverage radius of 2 km for TPS3R which has an area of 100-200 m² and 3 km for TPS3R areas above 200 m², there are 176 (48%) villages served by TPS3R waste facilities, this shows commitment in ensuring that most areas have access to sustainable waste management facilities, while 168 (52%) other villages are not served, this shows that there is room for improvement in waste management efforts, especially in villages that have not been covered.

According to researchers, good waste management is very important, especially with 3R-based waste management (Reuse, Reduce, Recycle) starting from the source, which can minimize environmental impacts. The emergence of various kinds of diseases and environmental damage is the result of waste piled up by human activities that are not managed properly. Apart from that, if it contaminates living things, it is also very dangerous. Technically operational waste management in Kediri Regency is still quite lacking where the current area handling level is still 12% which can be seen from the number of TPS3R and the number of TPS and transportation to TPA which is still limited. Meanwhile, the reduction rate from waste banks is still small, namely 0.4%, with the number of waste banks in Kediri Regency still small. The transport system is not yet 70% efficient, namely with a distance of more than 25 km per trip and the area served by the transport system is 54% or only 185 villages and 1 sub-district, while the processing at TPS3R is a 2% reduction in TPS3R with a large concentration of plastic and paper waste. composting is not running. Meanwhile, the condition of the landfill as the final processing of waste is only sufficient for up to 1 year from 2023, passive landfill land has not been closed, it has not served the entire district, solidification of waste in the landfill is less than optimal, but there is already planning for a TPST at the Sekoto TPA location, and there is a possibility that there will be a regional landfill development plan in the Mojo District area.

2. Institutional Aspect

Waste management in Kediri Regency is under the responsibility of the Waste and B3 Waste Management Division of the Environmental Service based on Kediri Regent's Regulation Number 34 of 2022. The current condition of institutions handling waste management refers to Kediri Regent's Regulation Number 55 of 2016 concerning Position, Organizational Structure , Description of Duties and Functions and Work.

Procedures of the Kediri Regency Environmental Service, especially in the Field of Cleanliness and Waste Management.

Meanwhile, there are 3 types of community-based waste institutions, namely institutions at the source of waste (Waste Reduction Community Empowerment), institutions at Waste Processing (TPS3R) and institutions at the end of waste processing (TPA).

An overview of the involvement of community organizations in each strategic area and rural area. In general, three (3) Strategic Areas (Agropolitan, Transportation, Fast Growing Urban) and Rural Areas have quite large percentages of "Not Actively Involved" (above 45%). Meanwhile, in the Fast Growing Area (Ngasem-Pare), community organizations are 100% actively involved. The Fast Growing Area only consists of two (2) villages (Ngasem and Pare), so that in these two community organizations it can be ensured that they are actively involved. The Agropolitan area has the largest percentage of "Very Actively Involved" community organizations with a percentage of 10%. Meanwhile, the Rural Area has a percentage of 18% (the largest of the five regions) for community organizations that are "Not Involved" in waste in their villages. Fast Growing Areas (Urban) have a percentage of 44% for community organizations that are "Actively Involved" in participating in waste management. This is quite logical because we see that urban communities already have their own community institutional models and are active in collective waste collection.

There are several main issues resulting from research on existing

conditions and existing problems in the institutional sub-system, including community institutions that run only centered on TPS3R, some villages have better human resources to have a tiered structure between the existing TPS3R, they still need a communication system between TPS3R and with the TPST development plan there is still no supporting institutional system.

3. Policy/Regulation Aspects

In the policy/regulatory aspect, Kediri Regency already has policies that are both conventional and normative and innovative. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the policy or regulatory aspects that cover the current waste problem are still relatively low based on the following considerations:

- Normative and Conventional Policies: Kediri Regency already has certain regulations governing waste management and handling, such as Regent's Regulation Regent's Regulation number 55 of 2016 concerning Position, Composition, Description of Duties and Functions and Work Procedures of the Kediri Regency Environmental Service (DLH), Regional Regulation number 2 of 2016 concerning Waste Management, as well as waste service levies in Regional Regulation number 2 of 2012 concerning Waste Service Levy.*
- Innovative Policy: Implementation of TPS3R is an innovative step in waste management, but is not yet supported by a clear legal basis. Planning documents and technical instructions already exist, but have not been legally or regulated. Waste Reduction Regulations at Source: Policies regarding waste reduction at source have been regulated, but do not include targets or desired achievements.*
- Waste Management Target: In the SSK (District Waste Management Strategy), there are targets to be achieved regarding waste handling and reduction, but there is no incentive/disincentive strategy or further elaboration regarding this policy.*
- TPST Plan: The development of a TPST (Integrated Waste*

Processing Site) is planned, but does not yet have a clear legal basis or institution related to the TPST.

- *Determination of Retribution: There is already a levy regarding waste management in Regent Regulation Number 61 of 2017 concerning Implementation Guidelines for the Collection of Waste/Cleaning Services Levy and Regional Regulation number 2 of 2012 concerning Waste Service Levy, but there is no binding policy regarding the determination and implementation of waste levy.*

4. Aspects Of Community Participation

The community has an important role in participating in waste management and processing, especially in waste collection. With the existence of a waste transportation system or waste institution in the village, the role of the community is clear, namely to accommodate their own waste and then collect it collectively by members of the waste institution in the village, where the Fast Growing Area (Urban) has the highest percentage (56%) for community involvement in holding them at home (to then be transported to the TPS). So it indicates that villages in Fast Growing Areas (Urban) have indeed implemented collective waste collection, and it is running because the community has been active in accommodating their own waste for collective collection.

Meanwhile, the Agropolitan area has the highest percentage (80%) of the absence of home storage by people in their respective homes, indicating that there is no collective waste collection system and the people of the agropolitan area tend to still manage their waste independently. Likewise in Rural Areas with a percentage of 75% for the absence of household storage by the community in their respective homes, it can then be concluded that villages in Rural Areas still carry out independent waste management.

The levy system is a payment system that must be present in a village that wants collective waste collection. So that collective waste collection

can continue and can fund its management as well. So it is important to know the level of willingness to pay (ability to pay) of the community. It can be observed that the range of willingness to pay 5,000-10,000 has the highest percentage in Agropolitan Areas and Transportation Areas. Meanwhile, fast growing areas (urban) show the highest percentage (34%) for willingness to pay, which is <5,000. However, the Fast Growing Area (Urban) is also the only area that has a percentage above 30% for people's willingness to pay of 20,000-30,000. Shows that the diversity of buildings in Fast Growing Areas (Urban) is indeed different from other areas (the variety is greater and the area is larger, so it is necessary to pay a higher levy system). Meanwhile, for rural areas, 35% agreed to pay <5,000 and 18% said they did not know their community's ability to pay. This can be circumvented by setting certain compensation levies on villages that have not been served and whose ability to pay is unknown.

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
ABSTRAK.....	viii
RINGKASAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xxxii
DAFTAR TABEL.....	xxxv
DAFTAR GAMBAR.....	xxxvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	7
1.3 TUJUAN PENELITIAN	7
1.4 MANFAAT PENELITIAN.....	8
1.4.1 Manfaat Bagi Pemerintah Kabupaten Kediri	8
1.4.2 Manfaat Akademis	8
1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti	8
1.5 KEASLIAN PENELITIAN.....	8
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Pengertian Sampah	11
2.1.2 Jenis-Jenis dan Sifat Fisik Sampah	12
2.1.3 Sumber-Sumber Sampah	14
2.1.4 Timbulan Sampah	15
2.2 Pengelolaan Sampah.....	16
2.2.1 Paradigma Pengelolaan Sampah	16
2.2.2 Upaya Pengelolaan Sampah	18
2.2.3 Aspek Pengelolaan Sampah	22
2.2.4 Kebijakan Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah	30

2.3	Sampah Medis Puskesmas	33
2.3.1	Pengertian Sampah Medis	33
2.3.2	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Sampah Medis di Puskesmas.	35
2.3.3	Pengelolaan Sampah Spesifik	37
2.5	Keaslian Penelitian.....	45
2.4	Kerangka Konsep.....	46
BAB III		48
METODE PENELITIAN.....		48
3.1	Jenis Penelitian	48
3.2	Sumber Data	49
3.3	Teknik Pengumpulan Data	50
3.4	Tahapan dan Metodology Survey	51
3.4.1	Pre-Eliminary Survey.....	51
3.4.2	Survey Primer.....	52
3.4.3	Informan Penelitian.....	57
3.5	Hasil Analisa	66
BAB IV		69
HASIL PENELITIAN.....		69
4.1	Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	69
4.1.1	Demografi.....	71
4.1.2	Topografi.....	73
4.2	Gambaran Kondisi Geografis Kabupaten Kediri.....	73
4.2.1	Hidrologi.....	75
4.3	Gambaran karakteristik Informan.....	77
4.4.	Analisa Hasil.....	87
4.4.1	Aspek Teknis Operasional.....	87
4.4.2	Aspek Kelembagaan.....	104
4.4.3	Aspek Kebijakan/Regulasi.....	106
4.4.4	Aspek Partisipasi Masyarakat.....	111
BAB V.....		114
PEMBAHASAN.....		114
5.1	Aspek Tekhnis Opreasional.....	114
5.2	Aspek Kelembagaan.....	118
5.3	Aspek Kebijakan / Regulasi.....	120
5.4	Aspek Partisipasi Masyarakat.....	123

BAB VI.....	125
KESIMPULAN DAN SARAN.....	125
6.1 Kesimpulan.....	125
6.2 Saran.....	126
LAMPIRAN.....	128
1. Formulir Persetujuan.....	128
2. Lembar Permohonan menjadi responden.....	130
3. Panduan wawancara.....	131
4. Transkrip Wawancara.....	134
5. Dokumentasi Penelitian.....	199
DAFTAR PUSTAKA	203



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Publikasi Yang Menjadi Rujukan.....	8
Tabel 2.1 Keaslian Penelitian	45
Tabel 3.1 Tabel Tahapan Survey	51
Tabel 3.2 Logic Framework Pemilihan Sample	54
Tabel 3.3 Sample Perkotaan	56
Tabel 3.4 Sample Perdesaan	57
Tabel 3.5 Daftar TPS3R di Kabupaten Kediri	61
Tabel 3.6 Data Bak Sampah di Kabupaten Kediri.....	63
Tabel 3.7 Lokasi Penempatan Pawadahan Sampah Komunal (TPS) di Kabupaten Kediri.....	65
Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan, Kelurahan, RW, dan RT pada Kabupaten Kediri.....	70
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk.....	72
Tabel 4.3 Data Timbulan Sampah Kabupaten Kediri.....	89
Tabel 4.4 Data SIPSAN Tahun 2022.....	90
Tabel 4.5 Data Lokasi TPS di Kabupaten Kediri	95
Tabel 4.6 Komposisi Sampah Pemukiman Wilayah Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Kediri	97
Tabel 4.7 Data Armada Pengangkutan Sampah di Kabupaten Kediri.....	99
Tabel 4.8 Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan di Kabupaten Kediri	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Paradigma Pengelolaan Sampah	17
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	47
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri	58
Gambar 4.1 Peta Administratif Kabupaten Kediri.....	69
Gambar 4.2 Peta Struktur Ruang Kabupaten Kediri.....	71
Gambar 4.3 Jumlah (a) dan (b) Kepadatan Penduduk Kabupaten Kediri.....	73
Gambar 4.4 Peta Topografi Kabupaten Kediri	74
Gambar 4.5 Pewadahan Sampah di Sumber	92
Gambar 4.6 Perbandingan Kondisi Lahan Urug Zona Pasif.....	103
Gambar 4.7 Komposisi Sampah Kabupaten Kediri pada Fasilitas	103

